

RINGKASAN

Sri Yuliani dan Argyo Demartoto, 2006. AKSESIBILITAS WARIA DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN PUBLIK DASAR DI KOTA SURAKARTA. FISIP Universitas Sebelas Maret. Penelitian Dosen Muda. Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas waria dalam memperoleh pelayanan publik dasar di Kota Surakarta dan problem apa saja yang dihadapi waria dalam mengakses pelayanan publik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas waria dalam memperoleh pelayanan publik. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. data primer diperoleh dari informan, yakni waria di Kota Surakarta, Kepala Kantor dan Aparat Pemerintah Kota Surakarta yang terkait dengan pelayanan publik dasar, serta berbagai elemen masyarakat. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen, buku-buku maupun peraturan-peraturan yang ada di kantor-kantor pemerintah maupun perpustakaan. Penentuan sumber data primer dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data primer dengan focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Sedang data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang subyek penelitian, maka digunakan teknik analisis interaktif. Data-data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah waria di Surakarta ada sekitar 127 orang yang menyebar di berbagai tempat mangkal waria yaitu Terminal Bis Tirtonadi 15 orang; Terminal Gilingan 35 orang; Kampung Talang 31 orang; Alun-alun kidul (alkid) 13 orang; GOR Sriwedari 10 orang; GOR Manahan 5 orang; Tempat Wedangan 5 orang; Kafe / Diskotik 10 orang; Solo Grand Mall 3 orang. Akan tetapi estimasi (perkiraan) jumlah waria di Kota Surakarta adalah sekitar 350 orang. Walaupun jumlah waria di Surakarta cukup banyak, namun keberadaan mereka belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat.

Aksesibilitas waria di Kota Surakarta dapat dikatakan rendah di semua jenis pelayanan publik dasar. Pemerintah menolak mengakui identitas waria di dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kategori jenis kelamin hanya ada dua : laki-laki dan perempuan. Waria oleh pemerintah dimasukkan ke dalam kelompok laki-laki disesuaikan dengan fisik atau biologisnya. Padahal waria ingin dirinya lebih diakui sebagai perempuan atau kalau tidak sebagai waria. Kebanyakan responden memilih tidak memiliki KTP dengan alasan karena di KTP mereka dipaksa tampil dengan foto atau identitas fisik sebagai laki-laki.

Waria sulit mengakses pelayanan atau pun fasilitas publik yang pemanfaatannya membedakan laki-laki dan perempuan seperti toilet umum, kamar di rumah sakit , sel di penjara , dan sebagainya. Toilet umum di Kota Surakarta yang memberi kamar untuk waria hanya ditemukan di Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari. Pemberian fasilitas ini karena THR menjadi tempat umum yang banyak dikunjungi waria . Toilet di THR Sriwedari dibedakan menjadi kamar untuk laki-laki/waria dan kamar untuk perempuan. Waria merasa tidak nyaman bila dijadikan satu dengan laki-laki, karena merasa jiwa dan naluri sebagai perempuan mereka lebih memilih toilet untuk perempuan. Namun, masyarakat umum , baik laki-laki mau pun perempuan semuanya menolak atau jijik jika harus berbaur dengan waria. Aparat pemerintah , sama dengan masyarakat umumnya, hanya mau memberi fasilitas atau layanan public yang disesuaikan dengan kondisi fisik waria yakni sebagai laki-laki.

Waria juga tidak leluasa dalam memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang harus berbagi dengan orang banyak seperti transportasi umum seperti bis kota dan angkutan kota, pasar atau mall, taman kota, dan tempat hiburan. Hampir semua informan menyatakan minder dan rendah diri jika harus memanfaatkan atau berbagi fasilitas publik dengan masyarakat. Mereka sadar jika dirinya menjadi pusat perhatian, ejekan, bahan tertawaan karena kondisi fisiknya. Mereka merasa sakit hati jika disebut atau diolok-olok sebagai banci. Waria juga menghadapi kesulitan dalam mengenyam pendidikan dan memperoleh pekerjaan apabila tetap bertahan dengan tampilan sebagai waria. Namun bila disuruh memilih antara menjadi laki-laki dan

bisa hidup normal atau tetap menjadi waria dengan segala resikonya, semua informan menyatakan akan tetap memilih dengan tampil sebagai waria dengan segala penderitaannya. Karena menurut mereka menjadi waria itu sesuatu yang tidak bisa ditolak atau karena naluri.

Sumber penyebab antipati masyarakat pada waria adalah pemahaman bahwa waria dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari yang normal yakni laki-laki yang berdandan perempuan dan secara seksual suka pada laki-laki (homoseksual). Kondisi ini menyebabkan orang jijik atau takut pada waria (homophobia) . Waria dianggap sebagai bagian dari orang cacat bahkan sakit jiwa. Penyebab homofobia adalah konstruksi sosial nilai-nilai budaya patriarki yang melihat waria sebagai bentuk patologi sosial. Stigmatisasi ini mempengaruhi aparaturnegara mau pun masyarakat dalam merumuskan maupun menyalurkan layanan publik.